



Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Gen Z pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

Adam Rizky Santoso^{1*}, Regi Refian Garis², Dini Yuliani³

1,2,3 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2728>

*Correspondence: Adam Rizky Santoso

Email: adamrizki493@gmail.com

Received: 07-04-2025

Accepted: 19-05-2025

Published: 28-06-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Strategi KPU dalam mendongkrak partisipasi Gen Z pada Pilkada Kabupaten Pangandaran 2024 dinilai kurang tepat, dan dari sinilah penelitian ini bermula. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan taktik yang digunakan KPU dalam mendongkrak partisipasi Gen Z pada Pilkada. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka, penelitian lapangan (observasi dan wawancara), serta pencatatan. Setelah mengolah hasil temuan observasi dan wawancara dengan menggunakan metodologi analisis data kualitatif, penulis menarik simpulan untuk menjawab permasalahan penelitian. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun rencana Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi Gen Z telah dilaksanakan, namun masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari sepuluh indikator yang digunakan untuk mengukur kelima dimensi tersebut, lima di antaranya belum mampu meningkatkan keterlibatan publik. Banyak anggota Generasi Z masih belum menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah, meskipun KPU telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan fakta ini. Selain itu,

meskipun KPU telah mengidentifikasi tempat pemungutan suara yang mudah diakses, beberapa anggota Generasi Z masih menghindari tempat pemungutan suara. Meskipun pemilih Gen Z juga telah dididik oleh KPU, masih sulit untuk membujuk mereka memperbarui informasi pemilih mereka. Meskipun KPU menekankan pentingnya kinerja masa lalu dalam membuat keputusan, para pelamar tidak dipilih berdasarkan hal ini. Lebih jauh, meskipun KPU menjelaskan secara gamblang tentang proses hak pilih, Gen Z masih belum begitu paham tentang cara menggunakan hak pilih mereka untuk memilih calon kepala daerah.

Kata Kunci: Strategi, Komisi Pemilihan Umum Daerah, Partisipasi Pemilih, Gen Z, Pemilihan Kepala Daerah.

Abstract: The strategy employed by the General Election Commission (KPU) to boost Gen Z participation in the 2024 Pangandaran Regency Regional Election is considered inadequate, which became the starting point of this study. This research aims to identify the tactics used by the KPU to increase Gen Z participation in the regional election. The methodology used in this study is descriptive analysis. The study involved four informants. Data collection methods included literature review, field research (observation and interviews), and documentation. After analyzing the findings from observations and interviews using qualitative data analysis methods, the researcher drew conclusions to address the research problem. The study's findings indicate that although the KPU's plans to increase Gen Z participation have been implemented, they have not yet functioned as expected. Of the ten indicators used to measure five key dimensions, five have failed to enhance public engagement. Many Gen Z individuals still abstain from voting in the regional elections, despite KPU efforts to raise awareness. Furthermore, although the KPU has identified accessible polling stations, some Gen Z members continue to avoid them. Despite voter education efforts, convincing Gen Z to update their voter information remains a challenge. Even though the KPU emphasizes the importance of evaluating candidates based on past performance, voters tend not to

use this criterion in decision-making. Additionally, despite the KPU's clear explanation of the voting process, Gen Z still lacks a strong understanding of how to exercise their voting rights effectively in selecting regional leaders.

Keywords: *Strategy, Regional General Election Commission, Voter Participation, Gen Z, Regional Election.*

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu manifestasi dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang dapat secara langsung dirasakan dan disaksikan oleh masyarakat. Pelaksanaan pemilu merupakan bagian dari agenda yang berlandaskan pada kebutuhan dan harapan masyarakat untuk memperbaiki sistem serta mekanisme pemerintahan. Pemilu juga menjadi bukti nyata bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang memiliki hak untuk memilih pemimpin atau wakil yang dapat menjadi saluran untuk menyalurkan aspirasi mereka. Kualitas demokrasi akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat jika mereka berpartisipasi aktif dan berpikir kritis, baik sebelum maupun setelah pemilu, dalam memilih presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah. Dengan memberikan suara dalam pemilu, masyarakat secara langsung berperan dalam menciptakan tatanan demokratis.

Tingkat kesadaran politik masyarakat juga akan mempengaruhi hasil pemilu, selain itu juga akan berdampak pada penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan. Keterlibatan dan kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kesadaran politik masyarakat. KPU menggunakan pendidikan politik sebagai salah satu strateginya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Untuk membantu masyarakat, khususnya generasi muda, agar menyadari pentingnya memilih dan menentukan calon yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka, KPU memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik dan informasi kepada masyarakat.

Dalam demokrasi, keterlibatan politik merupakan tolok ukur seberapa baik kewenangan tertinggi negara kedaulatan rakyat dilaksanakan. Peran aktif yang dimainkan oleh orang atau organisasi dalam politik dikenal sebagai keterlibatan politik. Ini termasuk memilih pejabat publik yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan publik. Semakin aktif suatu komunitas berpartisipasi dalam politik, semakin banyak bukti bahwa komunitas tersebut terlibat secara politik. Di sisi lain, keterlibatan politik yang rendah menunjukkan bahwa masyarakat kurang termotivasi untuk membentuk politik nasional. Orang-orang yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu karena mereka acuh tak acuh dan tidak peduli dengan politik umumnya disebut sebagai "golongan kulit putih" atau "golput".

Pemilih harus memenuhi syarat untuk dapat mengikuti kegiatan pemilihan umum. Pemilih harus berusia 17 tahun atau lebih pada saat memilih, sudah menikah atau pernah menikah, tidak kehilangan hak pilih, dan berdomisili di Indonesia serta memiliki kartu tanda penduduk (KTP), sesuai ketentuan yang mengatur kriteria pemilih dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2022. Pemilih yang berdomisili di luar negeri harus memiliki KTP atau paspor yang masih berlaku. Anggota TNI atau Polri dilarang menggunakan hak pilih, dan pemilih yang tidak memiliki KTP dapat menggunakan Kartu Keluarga.

Partisipasi dalam pemilu tidak hanya melibatkan pendapat para lansia, tetapi juga pendapat para milenial dan generasi Z, dengan pemilih pemula memegang peranan yang sangat penting. Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan adalah pemilih pemula. Para pemilih pemula memerlukan kehati-hatian ekstra agar mampu membuat keputusan sendiri karena sifat mereka yang unik, yang meliputi kerentanan atau kurangnya kemandirian mereka.

PKPU Nomor 09 Tahun 2022 mengatur tentang peran serta masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemilu, meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya selama proses berlangsung, dan meningkatkan partisipasi pemilih. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPU juga bertanggung jawab melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pemilih.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran melaporkan bahwa 1,81 persen pemilih adalah anak muda. Meski demikian, proporsi ini masih di bawah rata-rata nasional untuk pemilih muda sebesar 5,2%. Mengingat suara mereka akan sangat mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Pangandaran 2024, diharapkan pemilih muda akan lebih jeli. Menurut Bapak Muhtadin, S.HI., M.IP., Ketua KPU Pangandaran, terdapat 6.071 pemilih muda di Kabupaten Pangandaran dari 335.164 DPT.

Mengingat potensi mereka yang sangat besar untuk membentuk politik di masa depan, keterlibatan Generasi Z menjadi perhatian utama di Kabupaten Pangandaran. Karena tumbuh di era digital, Generasi Z memandang politik dan masyarakat secara berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka sering berpartisipasi dalam kampanye sosial dan politik, lebih toleran terhadap pandangan lain, dan cenderung lebih reseptif terhadap perubahan sosial dan politik. Kenyataan bahwa sebagian dari mereka masih belum terlibat secara aktif dalam pemilihan umum juga menimbulkan kesulitan, karena persentase partisipasi mereka hanya 1,81%, atau 6.071, sedangkan generasi non-Gen Z lebih besar yaitu 81,89%. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi yang lebih berhasil untuk meningkatkan keterlibatan Generasi Z dalam proses politik.

Sebagai perbandingan, penulis akan menyajikan tabel informasi tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Pangandaran pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024:

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

No	Jumlah pemilih dalam DPT	Jumlah seluruh Pengguna	Tingkat partisipasi
1	333.461	258.246	77,44 %

Sumber: KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

Berdasarkan statistik, partisipasi pemilih Kabupaten Pangandaran pada pemilihan presiden 2024 adalah 77,44%. Mayoritas masyarakat telah berpartisipasi dalam proses demokrasi, sebagaimana ditunjukkan oleh angka ini, namun tingkat keterlibatannya masih di bawah ideal. Sekitar 23% penduduk belum menggunakan hak pilihnya, menyoroti berbagai masalah yang perlu mendapat perhatian, seperti ketidakpedulian politik,

kesenjangan informasi, atau hambatan lain yang menghalangi partisipasi. Hal ini menegaskan perlunya peningkatan upaya dalam sosialisasi politik, pendidikan pemilih, dan fasilitasi akses untuk memungkinkan keterlibatan yang lebih inklusif dan berkeadilan di masa mendatang.

Selain itu, temuan awal menunjukkan bahwa rencana KPU untuk mendorong partisipasi pemilih Generasi Z pada Pilkada Kabupaten Pangandaran 2024 belum berjalan sebagaimana mestinya. Berikut ini beberapa aspek permasalahan yang menunjukkan hal tersebut:

1. Masih kurangnya KPU dalam meningkatkan literasi kepemiluan kepada pemilih Mudah. Contohnya: Kurangnya KPU dalam melaksanakan sosialisasi kepada pemilih Gen Z melalui media sosial terkait dengan tahapan pemilihan kepala daerah dan tujuan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pangandaran.
2. Masih kurangnya KPU melakukan pendidikan pemilih di lingkungan sekolah khususnya terkait dengan tahapan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pangandaran. Contohnya: Banyaknya pemilih Gen-Z yang menunjukkan sikap apatis terhadap berbagai tahapan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Pangandaran disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka tentang rekam jejak pasangan calon kepala daerah, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menentukan pilihan.
3. Masih kurangnya KPU dalam memberikan pengarahan kepada pemilih Gen Z. Contohnya masih adanya Gen Z yang belum melakukan pemutakhiran data pemilih karena kurangnya pemahaman terkait tahapan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: " Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Gen Z Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024"

Desain penelitian dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Sugiyono (2012: 9) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metodologi penelitian postpositivisme yang menggunakan peneliti sebagai alat utama untuk mempelajari objek yang terjadi secara alami (bukan eksperimen). Metode pengumpulan data menggunakan triangulasi (kombinasi), analisis data induktif dan kualitatif digunakan dalam analisis data, dan temuan penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi.

Informan dalam penelitian ini adalah Anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, 2 Orang Perwakilan Gen Z sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang.

Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi Gen Z pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024,

penulis melakukan penelitian melalui wawancara dan observasi dengan cara sebagai berikut:

Tujuan (*purposes*)

1) KPU menyampaikan tujuan pelaksanaan Pilkada kepada Gen Z

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa KPU telah menyampaikan tujuan pelaksanaan Pilkada kepada Gen Z melalui berbagai perencanaan yang dituangkan dalam sebuah strategi yang akan diterapkan sebagai dasar untuk implementasinya. Tujuannya agar informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada generasi Z, dengan target utama agar mereka memahami hak mereka sebagai warga negara dalam konteks pemilu dan elektoral.

Begitu pula, hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa KPU telah menyampaikan tujuan pelaksanaan Pilkada kepada Gen Z. Hal ini terlihat dari upaya KPU dalam merencanakan sosialisasi dengan mengalokasikan sumber daya untuk menetapkan sasaran, melalui identifikasi audiens yang tepat dan mengupayakan agar informasi kepemiluan dapat tersebar di ruang-ruang yang disasar. KPU juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti kampus, karangtaruna, organisasi mahasiswa, SMA, dan Dinas Pendidikan. Ini terbukti dari kegiatan yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Cijulang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Hafied (2013: 64), yang menyatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi perlu mengintegrasikan perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi agar menjadi pendekatan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Strategi komunikasi adalah kombinasi optimal dari berbagai elemen komunikasi, termasuk komunikator, pesan, media, penerima pesan, dan efek yang dirancang untuk mencapai hasil komunikasi yang maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh KPU Pangandaran dalam mensosialisasikan tujuan Pilkada kepada Gen Z sudah sesuai. Penerapan strategi ini dilakukan dengan penyampaian informasi yang jelas dan akurat mengenai proses pemilu, dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk sekolah-sekolah di Kabupaten Pangandaran, seperti yang terlihat pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU di SMK Negeri 1 Cijulang.

2) KPU meningkatkan kesadaran Gen Z untuk menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa KPU telah berupaya meningkatkan kesadaran Gen Z untuk menggunakan hak pilih mereka. KPU Kabupaten Pangandaran, dengan segala sumber daya dan waktu yang tersedia, menggelar berbagai kegiatan sosialisasi untuk menyebarkan informasi pemilu dan memberikan pendidikan politik kepada pemilih Gen Z.

Namun, hasil pengamatan menunjukkan bahwa KPU Pangandaran telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum, yaitu mereka yang baru berusia 17 tahun, serta siswa SMA dan SMK. Mengingat jumlah pemilih baru yang cukup banyak, maka sosialisasi kepada kelompok ini menjadi sangat penting karena pengetahuan dan pengalaman mereka masih terbatas, yakni belum pernah mengikuti pemilihan kepala

daerah sebelumnya. Untuk meningkatkan kesadaran Generasi Z tentang pentingnya ikut serta dalam pemilihan kepala daerah, KPU melakukan sosialisasi melalui sekolah, karang taruna, dan pondok pesantren.

Temuan penelitian ini mendukung pernyataan Yigibalom (2022) bahwa sangat penting bagi Komisi Pemilihan Umum untuk mendidik pemilih baru dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang peran penting kaum muda dalam proses demokrasi. Kemakmuran suatu daerah sangat bergantung pada kaum mudanya, dan sangat penting bagi mereka untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin yang akan membentuk arah pertumbuhan nasional. Masyarakat umum dan siswa sekolah menengah/kejuruan, yang baru berusia 17 tahun dan memiliki sedikit pengetahuan dan pengalaman karena mereka belum pernah mengikuti pemilihan umum, juga menjadi fokus indoktrinasi ini. Karena jumlah pemilih baru yang begitu banyak, sangat penting untuk melakukan sosialisasi di sektor ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa KPU telah memiliki strategi untuk meningkatkan kesadaran Gen Z dalam menggunakan hak pilih mereka. Strategi komunikasi yang diterapkan oleh KPU Pangandaran melibatkan komunikasi kelompok, seperti melalui forum diskusi dan workshop yang melibatkan kelompok pemuda dan komunitas mahasiswa. Dalam forum-forum ini, KPU tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendorong diskusi yang memungkinkan peserta untuk saling berbagi pengalaman dan pandangan mengenai pemilu. Metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pemilih, tetapi juga membangun rasa kebersamaan di antara pemilih pemula.

Dengan demikian, strategi KPU Pangandaran dalam meningkatkan partisipasi Gen Z pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024, yang tercermin melalui dimensi tujuan (purposes) dengan dua indikator yaitu penyampaian tujuan pelaksanaan Pilkada kepada Gen Z dan peningkatan kesadaran Gen Z untuk menggunakan hak pilih telah dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih belum optimal, karena keterlibatan pemilih Gen Z sebagai pemilih aktif maupun sebagai penyelenggara pemilu masih kurang.

Lingkungan (*environments*)

1) KPU Menentukan tempat pemilihan yang mudah dijangkau oleh Gen Z;

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pemilihan lokasi TPS telah mendapat perhatian serius dari KPU, yang memastikan bahwa penentuannya mempertimbangkan kemudahan akses. Sebagian besar TPS terletak di lokasi strategis dan tidak jauh dari tempat tinggal warga atau pemilih, sehingga mereka tidak kesulitan untuk mencapai TPS dan dapat menggunakan hak pilih mereka dengan baik.

Begitu pula, hasil observasi menunjukkan bahwa pemilih tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan hak pilih mereka, karena lokasi tempat pemungutan suara sangat dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Menurut Anwar (2015:78), partisipasi politik adalah kegiatan sukarela yang dilakukan oleh warga untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan,

baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pembentukan kebijakan publik. Kegiatan ini mencakup tindakan politik seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri kampanye, melakukan lobi dengan politisi atau pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan suara pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pangandaran, strategi KPU dalam menentukan lokasi pemilihan yang mudah dijangkau oleh Gen Z memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi pemilih. Hal ini terlihat dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

2) KPU melakukan pendidikan pemilih di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa KPU telah melakukan pendidikan pemilih di sekolah-sekolah dan lingkungan pesantren untuk menyebarkan informasi mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pangandaran. Namun, partisipasi aktif pelajar dan santri dalam kegiatan pendidikan politik tersebut masih rendah, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pangandaran.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa peran aktif siswa dalam mengikuti pendidikan politik di sekolah yang diselenggarakan oleh KPU masih kurang. Banyak siswa dari sekolah tersebut, maupun siswa dari sekolah lain, yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran siswa untuk mengikuti kegiatan tersebut, sehingga tingkat kehadiran mereka dalam kegiatan pendidikan politik masih rendah.

Menurut Kartono (2019:3), pendidikan politik perlu diberikan kepada generasi muda, mengingat kondisi masyarakat yang beragam, banyak di antaranya yang masih terbelakang dan tidak memiliki pengetahuan politik. Pendidikan ini diperlukan untuk merangsang partisipasi aktif masyarakat dalam berperan sebagai pemilih dan penyelenggara pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan pendidikan politik untuk pemilih pemula sudah dilaksanakan, meskipun belum efektif sesuai dengan tujuan dari penyuluhan tersebut. Tujuannya adalah untuk menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal, dan program pemilihan, serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pemilihan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pangandaran. Hal ini terbukti dengan masih kurangnya pemahaman Gen Z tentang tujuan pemilihan kepala daerah, sehingga mereka datang ke TPS hanya sekadar untuk memenuhi hak pilih mereka.

Pengarahan (*directions*)

1) KPU melaksanakan sosialisasi kepada pemilih Gen Z.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa lembaga melakukan Pendekatan kolaboratif dan menghibur dimaksudkan untuk membuat sosialisasi ini lebih menarik. KPU Pangandaran juga memperkenalkan inisiatif "KPU Goes To School", yang berupaya

untuk bergabung dengan lingkungan sekolah dan berkomunikasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh murid-murid, selain kegiatan hiburan. Kurikulum ini mengajarkan anak-anak tentang proses pemilihan dan hak pilih mereka selain pentingnya menggunakan hak pilih mereka. Selain itu, KPU Pangandaran menggunakan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok sebagai alat utama mereka untuk mendidik Generasi Z tentang pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa KPU Pangandaran telah melaksanakan sosialisasi kepada pemilih Gen Z di sekolah, sehingga siswa dapat mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan karena kegiatan tersebut dikemas secara menarik, yang membangkitkan minat siswa untuk berpartisipasi. Selain itu, untuk mendukung kelancaran sosialisasi, KPU telah bekerja sama dengan sekolah-sekolah, yang membantu mengarahkan siswa untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

- 2) KPU melaksanakan edukasi kepada pemilih Gen Z untuk melakukan pemutakhiran data pemilih.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa KPU telah melakukan edukasi kepada pemilih Gen Z mengenai pentingnya pemutakhiran data pemilih, agar mereka dapat berperan aktif dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pangandaran. Selain itu, KPU juga memberikan pengarahan mengenai pemutakhiran data pemilih, sehingga pemilih dapat mengikuti kegiatan pemilihan kepala daerah. Bagi pemilih yang sudah berusia 17 tahun namun belum memiliki KTP Elektronik (KTP-El), disarankan untuk segera melakukan perekaman KTP-El. Setelah itu, mereka dapat mendaftar sebagai pemilih di Kantor KPU atau melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di Kantor Camat setempat.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa KPU telah melakukan edukasi kepada pemilih Gen Z tentang pemutakhiran data pemilih melalui sosialisasi di sekolah, sehingga siswa dapat memahami mekanisme pembuatan KTP sebagai salah satu syarat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah.

Menurut Cahyanmingsih (2019:29), tujuan dari pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih adalah untuk memastikan semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap secara komprehensif, memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi aktual (akurat dan terbaru), memastikan tidak ada nama orang yang tidak berhak memilih, melayani pemilih dalam menggunakan hak pilih, dan mempersiapkan logistik pemilu.

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa KPU telah berhasil melakukan edukasi kepada pemilih Gen Z mengenai pemutakhiran data pemilih selama sosialisasi di sekolah, sehingga siswa dapat memahami proses pendaftaran sebagai pemilih tetap dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti memiliki KTP.

Tindakan (*actions*)

- 3) KPU melaksanakan pemasangan baner atau baliho sebagai bahan sosialisasi yang menarik Gen Z.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa KPU Pangandaran telah melakukan pemasangan banner atau baliho sebagai sarana sosialisasi yang menarik bagi Gen Z, sehingga dapat menarik minat mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pada alat peraga ini terdapat informasi seperti ajakan untuk memilih, jadwal pemilihan, tata cara mencoblos, alur pemilihan, serta foto calon dan wakil gubernur. Langkah ini diambil agar Gen Z tidak merasa bingung dalam menentukan pilihan mereka.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa KPU telah melaksanakan pemasangan banner atau baliho untuk sosialisasi yang menarik perhatian Gen Z, sehingga mereka lebih mengenal calon-calon wakil mereka. Melalui media ini, masyarakat dapat mengetahui visi-misi, biografi para calon, serta jadwal dan alur pelaksanaan Pemilu. Selain itu, masyarakat Kabupaten Pangandaran juga dapat memantau perkembangan Pemilu, mulai dari kampanye hingga perhitungan suara. Media memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan dengan baik dan berkualitas.

Menurut Bungin (2011:321), penggunaan baliho sebagai media sosialisasi politik calon, secara filosofi, merupakan saluran informasi yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku calon pemilih di masa depan. Hal ini terjadi karena baliho adalah realitas sosial yang sengaja dikonstruksikan oleh para calon untuk calon konstituen mereka, menciptakan gambaran tentang kesederhanaan, kesantunan, kewibawaan, dan lain sebagainya, untuk mencapai kemenangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa KPU Pangandaran telah melaksanakan pemasangan banner atau baliho sebagai sarana sosialisasi yang efektif untuk menarik minat Gen Z. Penggunaan media ini di tempat strategis terbukti cukup efektif, karena Gen Z lebih tertarik jika alat peraga kampanye dan konten yang disampaikan terorganisir dengan baik.

4) KPU menyebarkan informasi kepada pemilih Gen Z melalui media sosial.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa KPU telah menyebarkan informasi kepada pemilih Gen Z melalui media sosial. Strategi ini diterapkan karena media sosial sangat dekat dengan Gen Z, yang memang lebih familiar dengan platform tersebut. Salah satu tantangan yang dihadapi KPU Kabupaten Pangandaran adalah kurangnya minat Gen Z dalam mencari dan mengakses informasi politik. Meskipun demikian, salah satu upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi politik Gen Z adalah melalui pemanfaatan media sosial. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Pangandaran tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memanfaatkan media sosial untuk menarik perhatian dan mendidik masyarakat, khususnya kalangan muda, tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Penggunaan media sosial dalam sosialisasi ini terbukti sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama pemilih pemula, karena platform tersebut sangat efektif untuk menyebarkan informasi terkait pemilu.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa meskipun KPU telah menyebarkan informasi kepada pemilih Gen Z melalui media sosial, akses mereka untuk memperoleh informasi politik masih rendah. Hal ini terlihat dari ruang diskusi yang ada di media

sosial sebagai pemicu partisipasi masyarakat yang masih kurang berkembang. Akibatnya, penggunaan media sosial untuk menyampaikan informasi mengenai pemilihan kepala daerah belum cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih Gen Z.

Menurut Mandagi (2013:6), efektivitas sosialisasi dapat dilihat dari penggunaan media yang tepat. Media yang digunakan dalam sosialisasi harus sesuai agar pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah, sehingga tujuan sosialisasi dapat tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pangandaran sesuai dengan keputusan tentang tahapan, program, dan jadwal pemilu. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi harus selaras dengan tahapan, program, dan jadwal yang berlangsung. Media merupakan elemen yang tak terpisahkan dalam sosialisasi Pilkada. Penggunaan media sosialisasi Pilkada sangat penting karena membantu KPU Kabupaten Pangandaran dalam menyampaikan informasi yang relevan kepada masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemilu, untuk mewujudkan pemilihan yang transparan. Namun, penggunaan media sosial untuk menyampaikan informasi politik belum efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih Gen Z karena kurangnya minat Gen Z dalam memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi politik.

Belajar (*learning*)

5) KPU menyampaikan pentingnya rekam jejak dalam menentukan pilihan;

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa KPU telah mensosialisasikan rekam jejak masing-masing calon sehingga pemilih dapat membuat keputusan berdasarkan kelebihan pasangan calon yang telah disampaikan. Sosialisasi mengenai rekam jejak kepada pelajar atau Generasi Z sangat penting karena pemilih pemula biasanya memiliki sedikit pengalaman, hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi sebelumnya mengenai pelaksanaan pemilu.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa masih banyak generasi Z yang kebingungan dalam menentukan pilihan karena mereka kurang mengetahui siapa calon yang tepat. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki cukup informasi mengenai rekam jejak masing-masing calon. Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi yang disampaikan, diharapkan dapat membantu mereka untuk menentukan pilihan dengan lebih jelas.

Menurut Citrayanti (2021), para pemilih, khususnya kelompok pemuda, seringkali tidak mengetahui rekam jejak calon pasangan kandidat kepala daerah. Dalam survei yang dilakukan, hanya sekitar 19% pemilih muda yang mengetahui rekam jejak para kandidat, sementara 62% tidak mengetahuinya, dan 19% lainnya merasa tidak yakin meskipun sudah mengetahui rekam jejak calon pemimpin daerah mereka.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa KPU telah melakukan sosialisasi mengenai rekam jejak calon-calon kepala daerah, yang memungkinkan pemilih untuk menentukan pilihan mereka dengan lebih baik. Rekam jejak seorang calon sangat penting untuk diketahui oleh pemilih, karena hal ini

memberikan gambaran tentang latar belakang calon pemimpin. Semakin baik prestasi seseorang, baik dalam pekerjaan, lingkungan, maupun pengabdianya kepada masyarakat, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan penting bagi pemilih untuk membuat keputusan yang bijak dalam memilih.

6) KPU menyampaikan mekanisme dalam menggunakan hak pilih dengan jelas.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa KPU telah dengan jelas menyampaikan mekanisme penggunaan hak pilih kepada generasi Z dalam berbagai kesempatan, seperti kegiatan sosialisasi di sekolah maupun pesantren. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pemilih Gen Z terkait bagaimana cara menggunakan hak pilih mereka dengan benar.

Begitu juga, hasil observasi menunjukkan bahwa KPU telah memberikan penjelasan yang jelas mengenai mekanisme penggunaan hak pilih kepada pemilih Gen Z melalui kegiatan sosialisasi di sekolah dan pesantren, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak pilih.

Menurut Surbakti (2007:17), sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik kepada anggota masyarakat. Melalui sosialisasi politik, masyarakat memperoleh sikap dan pandangan terhadap kehidupan politik di sekitarnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa KPU telah melakukan sosialisasi yang cukup untuk menyampaikan mekanisme penggunaan hak pilih kepada generasi Z melalui berbagai kesempatan, termasuk di sekolah dan pesantren. Namun, pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya pemilu bagi Gen Z di Kabupaten Pangandaran masih kurang. Banyak dari mereka yang belum sepenuhnya memahami bagaimana sistem Pemilu bekerja, bagaimana suara mereka dapat mempengaruhi hasil, atau mengapa mereka perlu berpartisipasi secara aktif.

Berdasarkan penelitian tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Gen Z pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024, dari lima dimensi dengan 10 indikator yang digunakan, ditemukan bahwa lima indikator yang diteliti belum optimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Meskipun KPU telah berupaya meningkatkan kesadaran Gen Z untuk menggunakan hak pilih mereka, masih banyak Gen Z yang belum memanfaatkan hak suara mereka dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, meskipun KPU telah menentukan tempat pemungutan suara yang mudah dijangkau oleh Gen Z, masih ada yang tidak hadir di TPS. Walaupun KPU telah melaksanakan edukasi untuk pemilih Gen Z, masih sulit untuk mengajak mereka melakukan pemutakhiran data pemilih. Meski KPU telah menyampaikan pentingnya rekam jejak calon dalam menentukan pilihan, hal ini kurang dijadikan pertimbangan dalam menentukan pilihan mereka. Terakhir, meskipun mekanisme penggunaan hak pilih telah disosialisasikan dengan jelas, kesadaran Gen Z dalam menggunakan hak suara mereka untuk memilih calon kepala daerah masih sangat rendah.

Kesimpulan

Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi Gen Z pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 telah dilaksanakan meskipun belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini terbukti dari lima dimensi dengan 10 indikator yang digunakan sebagai alat ukur, di mana lima indikator yang diteliti belum maksimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Meskipun KPU telah berupaya meningkatkan kesadaran Gen Z untuk menggunakan hak pilih mereka, masih banyak Gen Z yang belum memanfaatkan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, meskipun KPU telah menentukan tempat pemungutan suara yang mudah dijangkau oleh Gen Z, masih ada sebagian yang tidak hadir di TPS. Walaupun KPU telah melakukan edukasi kepada pemilih Gen Z, masih sulit untuk mengajak mereka melakukan pemutakhiran data pemilih. Meskipun KPU telah menyampaikan pentingnya rekam jejak calon dalam menentukan pilihan, hal tersebut kurang menjadi dasar bagi Gen Z dalam memilih. Selain itu, meskipun mekanisme pemilihan telah disosialisasikan dengan jelas, kesadaran Gen Z dalam menggunakan hak pilih mereka untuk memilih calon kepala daerah masih rendah.

Terdapat beberapa hambatan dalam penerapan strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi Gen Z pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024. Salah satunya adalah masih banyaknya kecamatan hingga desa yang belum memiliki akses internet yang memadai, sehingga konten edukasi mengenai pemilu yang disebarakan melalui media sosial KPU Kabupaten Pangandaran belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, sikap Gen Z yang cenderung tidak tertarik untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan lebih fokus pada kepentingan individu menjadi tantangan besar bagi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik generasi ini.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan mendatangi sekolah-sekolah di Kabupaten Pangandaran. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan memberikan edukasi terkait proses pemilu. KPU juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat, dengan mengunggah berbagai konten menarik terkait KPU Kabupaten Pangandaran. KPU Kabupaten Pangandaran berusaha untuk memanfaatkan media sosial sebagai saluran sosialisasi politik, karena media sosial memiliki potensi besar dalam mengubah lanskap partisipasi politik warga negara. Melalui media sosial, informasi dan berita politik dapat diakses secara cepat dan luas, sehingga dapat menjangkau lebih banyak orang.

Daftar Pustaka

- _____. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah. Mada University Press.
- _____. 2018. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Depok: Prenadamedia Group.
- Anwar, M. 2015. *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cahyanmingsih, U. 2019. *Manajemen sumber daya manusia dalam pelayanan publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Firmanzah, 2017. *Marketing Politik, Antara Pemahaman dan Realitas* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Hafied, C. 2013. *Manajemen pelayanan publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Isma Kusmiati. 2024. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Karimah Tauhid*. Vol. 3 No. 4 (2024).
- Kartono, K. 2019. *Pemimpin dan kepemimpinan: Apakah kepemimpinan abnormal itu?* Jakarta: Rajawali Pers.
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
- Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU
- Kristiowati, 2021. *Generasi Z & Revolusi Industri 4.0*. Banyumas: CV. Pena. Persada.
- Kumolo, T. 2015. *"Politik Hukum PILKADA Serentak"*. Bandung: PT Mizan.
- Mandagi, C. 2013. *Administrasi publik modern*. Manado: CV. Indomedia Pustaka.
- Mas'ood, Mohtar dan Macandrews, Colin. 2011. *Perbandingan Sistem Politik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Muhammad, 2012. *Strategi Pemerintahan*. Jakarta : Erlangga.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Cetakan ke empat, Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Rangkuti, Freddy. 2014. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Reisya Dwi Ayu Meisavio (2023) Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Gen Z Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 8(2), 1–13.
- Rush, M., & Althoff, P. 2011. *Introduction to political science*. New York: McGraw-Hill.
- Setiadi, Elly M dan Kolip Usman. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Pt Kencana Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Supranto, J. dan Nandan Limakrisna, 2017. *Petunjuk praktis penelitian ilmiah untuk menyusun skripsi, tesis, dan disertasi edisi 3*. Jakarta : Mitra. Wacana
- Surbakti, R. 2007. *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.
- Syafiie Inu Kencana, 2019. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: PT.Refika. Aditama.
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang tugas dan wewenang KPU Kabupaten

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Yigibalom, T. 2022. *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah*. Jakarta: Kencana.

Yuris Fadila Diazzaki. (2024) Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi-Z Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*. Vol. 5 No. 2 (2024): Agustus 2024